



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 870/VII/2015

I/JULI 2015



Perlu Sosialisasi dan Penambahan Rambu Tol Cipali



Perlu Sosialisasi dan Penambahan Rambu Tol Cipali



Tim kunjungan spesifik Komisi V DPR di Kantor PT. Lintas Marga Sedaya (LMS)

Masih minimnya rambu-rambu dan marka jalan serta belum maksimalnya sistem penerangan jalan menjadi perhatian khusus Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR saat meninjau langsung kondisi Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) Jawa Barat, Kamis (2/7).

Rombongan Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Yudi Widiana tiba di Gerbang Tol Cikopo sekitar pukul 10.30 WIB disambut hangat oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar beserta jajarannya.

Dalam pantauan langsung tersebut, Ketua Tim Kunker Spesifik Yudi Widiana Adia menekankan pentingnya sosialisasi masif kepada para pengendara mengenai tata cara berkendara yang aman selama melewati ruas Tol Cikopo, Palimanan.

“Saya rasa masih ada cukup waktu bagi pihak terkait untuk melakukan sosialisasi sebelum puncak arus mudik tiba untuk meminimalisir terjadinya ke-

celakaan lalu-lintas di Tol Cipali,” saran Yudi.

Politisi PKS ini juga mengingatkan pihak Jasa Marga, Dirjen Perhubungan, Jajaran Kepolisian dan para *stake holder* untuk bahu-membahu dan meningkatkan koordinasi menjelang arus mudik lebaran 2015.

“Hadirnya Tol Cipali akan mengurangi beban kepadatan jalur pantura dan mempercepat perjalanan Jakarta -Cirebon dan diharapkan arus mudik lebih lancar dan nyaman,” tambah Yudi.

Sementara itu Anggota Komisi V Rendhy Lamadjido menekankan agar kelengkapan rambu-rambu lalu lintas ditambah dan segera dipasang untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Saya lihat sepanjang jalan masih minim rambu-rambu termasuk pagar pembatas yang hanya berupa kawat berduri mudah ditembus hewan peli-

haraan masyarakat dan sangat membahayakan bagi pengemudi,” ungkap Rendhy.

Namun demikian, Anggota Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR secara umum mengapresiasi kondisi fisik Tol Cikopo - Palimanan yang dinilai mulus dan rapi dalam pengerjaannya. “Saya harus jujur untuk masalah kualitas jalan bagus dan rapi dalam pengerjaannya,” aku Rendhy.

Rombongan Komisi V DPR didampingi Wagub Jabar Dedy Mizwar melanjutkan pantauannya menyusuri jalanan Tol Cipali dan berhenti di Gerbang Tol Subang. Di sini rombongan meninjau lokasi Kantor PT. Lintas Marga Sedaya (LMS) sekaligus mendengarkan paparan singkat mengenai profil Tol Cipali serta persiapannya menghadapi arus mudik.

Perwakilan PT. LMS selaku operator Tol Cipali menjelaskan bahwa ruas Tol Cipali memiliki panjang 116.75 Km dan melalui 5 (lima) Kabupaten yaitu Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka dan Cirebon.

Jalan Tol yang juga terusan dari Tol Jakarta - Cikampek ini juga memiliki 7 (tujuh) simpang susun (pintu keluar-masuk), yaitu simpang susun Cikopo, Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya dan Palimanan.

Sementara Perwakilan Jasa Marga mengungkapkan bahwa Jalan Tol Cipali merupakan bagian dari Sistem Jalan Tol Trans Jawa yang membentang dari Merak hingga Banyuwangi. Pemerintah saat ini sedang memprioritaskan penyelesaian pada koridor Cikampek-Semarang-Surabaya sepanjang sekitar 615 kilometer. (Od) foto: naefuroji@parle/hr



Gubernur BI Apresiasi DPR Terkait Rencana Revisi UU BI



Pimpinan DPR RI berdialog dengan Gubernur BI

Gubernur Bank Indonesia mengapresiasi rencana DPR RI yang akan merevisi Undang-undang Bank Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo kepada wartawan usai pertemuan dengan Pimpinan DPR RI di ruang tamu Pimpinan DPR, Rabu (1/7).

“Kami mengapresiasi rencana DPR, dengan demikian kami telah menerima penegasan dari DPR dalam bentuk akan dilakukannya revisi UU BI atas inisiatif DPR. Kami diundang untuk memberikan masukan bagaimana pandangan BI atas rencana revisi UU BI tersebut,” ungkap Agus.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menjelaskan sekitar ta-

hun 2008-2009 terjadi kasus penerbitan Perppu JPSK, yang kemudian ditolak DPR. Saat ini DPR tengah mengupayakan Perppu tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang, sehingga lebih pasti, dan pemerintah juga memiliki kekuatan terutama ketika sistem keuangan negara kita terganggu oleh dinamika perekonomian global.

“Revisi UU Bank Indonesia harus segera diselesaikan sehingga Bank Indonesia memiliki jaminan dan kepastian dalam menghadapi situasi ekonomi yang akan terjadi nanti. Karena sebagaimana diketahui fungsi dan pengawasan BI sudah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan, tentu selain itu juga harus ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan kembali oleh Bank Indonesia. Meskipun yang terpenting memang undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK),” jelas Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Politisi dari Fraksi PKS Dapil NTB ini menambahkan sejatinya hal ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan tentang Paket Undang-Undang yang akan digunakan Negara kita, terutama jika situasi perekonomian dunia tidak kunjung membaik. Karena ada perkembangan ekonomi dunia yang terus menurun, dari 4 menjadi 3,3. Itu sebabnya DPR punya PR yang akan diselesaikan segera. Dan Pemerintah pun berkepentingan sekali agar ini dipercepat. Fahri berharap undang-undang tersebut dapat segera diselesaikan pada Agustus mendatang sebagai hadiah HUT RI ke-70 tahun. (Ayu) foto: denus/parole/hr

Ketua DPR Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu



Ketua DPR Setya Novanto didampingi isteri Deisti Novanto menyerahkan bingkisan kepada anak-anak yatim piatu

Ketua DPR Setya Novanto didampingi isteri Desti Novanto, Ketua BURT Roem Kono, anggota DPR Robert Yoppy Kardinal dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti beserta pejabat Setjen, Senin (29/6) di Aula Masjid Baiturrahman Komplek Parlemen, Senayan menggelar acara buka bersama anak-anak yatim.

Sekitar 300 anak yatim dari Yayasan Sautul Qolbi dan Rumah Asuh Aisyah Pondok Labu Jakarta Selatan hadir dalam acara ini, selain menerima bingkisan juga mendengar ceramah Ramadhan dari Ustad Aswan Faisal. Hadir pula sejumlah wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan DPR.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, momen buka bersama ini merupakan kebahagiaan tersendiri. Karena kehadiran anak-anak yatim selain menikmati bingkisan dan hidangan yang



disediakan juga pendorong doa bagi DPR supaya kepentingan bangsa dan negara ke depan semakin maju dan semakin baik.

“Inilah saatnya bersama anak-anak yatim piatu bergembira dan beribadah di bulan penuh pengampunan ini serta menjelang hari kemenangan Idul Fitri. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan hikmat dan amal iba-

dahnya diterima Allah SWT,” tegasnya.

Suasana akrab ditunjukkan Ketua DPR dengan ramahnya menegur, anak-anak semua betul berpuasa?, kemudian dijawab serempak “puasaaa”. Bagi DPR, kata Novanto doa anak yatim ini membawa syafaat, semoga DPR kita ini ke depan lebih baik.

Dia juga menyatakan terkesan dengan kehadiran anak yatim piatu ini

bahwa semuanya adalah cikal bakal pemimpin keluarga, masyarakat dan pemimpin bangsa. “Saya doakan dari kalian ada yang jadi Gubernur, jadi anggota DPR, Menteri, bahkan jadi Presiden,” ujarnya yang diamini segenap anak yatim piatu yang hadir dalam acara ini. (mp)/foto: denus/parle/hr

Laporan APBN 2014 Jangan Sekedar Formalitas

DPR berharap laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 yang disampaikan Pemerintah melalui Menteri Keuangan, tidak sekedar formalitas dan dikesampingkan. Melainkan disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kamis (25/06/15). Rapat Paripurna beragendakan Laporan Pemerintah atas Pelaksanaan APBN 2014, yang disampaikan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.

“Kami mengharapkan ke depannya laporan pertanggungjawaban ini tidak hanya sekedar formalitas, tapi juga disesuaikan dengan hasil audit BPK. Hasil audit BPK itu menjadi salah satu kelengkapan Komisi DPR untuk menyetujui ataupun membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) 2016 mitra kerja Komisi,” jelas Taufik.

Hasil audit BPK itu, baik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), atau Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*) akan menjadi batas acuan dalam politik anggaran di DPR untuk tahun mendatang. Walaupun APBN 2014 merupakan produk dari pemerintahan sebelumnya.

“Sesuai tata aturan dalam UU, APBN sebelumnya menjadi acuan pada saat pembahasan APBN 2016. Sebab, laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBN sebelumnya akan menjadi kelengkapan data,” imbuh Politisi Partai Amanat Nasional itu.

Menanggapi LKPP 2014 yang mendapat opini WDP BPK, Taufik melihat hal ini sebagai sebuah tantangan. Sebab, diharapkan hasil audit BPK untuk kementerian dan lembaga seluruhnya adalah WTP.

“Kita akan memacu dan mendorong pemerintah agar kementerian/lembaga yang opini BPK masih WDP menjadi WTP. Contohnya DPR dan beberapa kementerian yang selalu mendapatkan opini WTP,” kata Politisi asal Dapil Jawa Tengah itu.

Namun Taufik menyayangkan masih banyaknya kementerian dan lembaga yang masih mendapat opini WDP. Dia menilai, sejumlah faktor ikut mempengaruhi sehingga posisinya tidak meningkat.

“Antara lain penyerapan yang tidak maksimal dan faktor ketidaklengkapan administratif. Hal lain adalah kondisi dan situasi di lapangan seperti bencana alam,” analisa Taufik.

Hal-hal semacam itu dinilainya membuat APBN yang dianggarkan tidak terserap dengan semestinya. Tak heran bila pada akhirnya mempengaruhi penilaian dan audit BPK.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

“Opini WDP bukan berarti tingkat korupsi tinggi. Namun barangkali aspek administratif terlewatkan. Di masa mendatang, jangan sampai terlewat sehingga laporan pertanggungjawaban yang diberikan benar-benar komprehensif,” imbuhnya.

Taufik menjelaskan, penghargaan DPR terhadap kementerian/lembaga dengan opini WDP dan WTP tentu berbeda. Sebab, status tersebut akan menentukan acuan anggaran di tahun berikutnya.

“Sepanjang kementerian/lembaga bisa bertahan dengan opini WTP, tentu akan ada apresiasi. Sementara, yang masih WDP atau TMP (*disclaimer*) tentu harus meningkatkan kinerjanya,” imbuh Taufik.

Sebelumnya, Menkeu melaporkan, pada tahun anggaran 2014, dari 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), 62 LKKL mendapat opini WTP, 17 LKKL mendapat opini WDP, dan 7 LKKL mendapat opini TMP. (sf),

foto : andri/parle/hr.

DPR Sampaikan Bela Sungkawa Atas Jatuhnya Pesawat Hercules

Seluruh Anggota DPR mengucapkan belasungkawa atas peristiwa jatuhnya Pesawat Hercules C-130 milik TNI AU

yang jatuh di Jalan Jamin Ginting, Kawasan Simpang Sima Lingkar, Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/06/15) lalu.



Pesawat Hercules milik TNI AU

Ucapan belasungkawa itu diwakili oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F-PAN)

“Kami turut berduka cita dan berbelasungkawa atas meninggalnya puter-puteri terbaik TNI dalam musibah jatuhnya pesawat Hercules di Medan,” kata Taufik, sebelum memulai Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Rabu (1/07/15). Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini pun memimpin doa bersama seluruh Anggota Dewan yang hadir.

Sebagaimana diberitakan oleh berbagai media massa, pesawat Hercules milik TNI AU itu jatuh ini persis di dekat Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, bekas Bandara Polonia Medan.

TNI AU merilis jumlah korban kecelakaan pesawat Hercules ini mencapai 122 penumpang. Jumlah penumpang Hercules itu terdiri dari 12 kru atau awak pesawat dan 110 penumpang. (sf)/foto: dok/parle/hr

DPR Ajukan Usulan Pembangunan Dapil



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima Pandangan Fraksi dari Jubir Fraksi Partai Golkar

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Rabu (1/7) membahas usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Dari sepuluh fraksi di DPR, sebanyak 6 fraksi menyampaikan usulannya, satu fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat menunda belum membacakan usulan, sementara 3 fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan

Fraksi Partai Hanura tetap konsisten sebagaimana disampaikan dalam Rapat Paripurna sebelumnya tetap menolak dan tidak ikut bertanggungjawab atas UP2DP tersebut.

Dalam acara yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sumantri Brodjonegoro dan jajaran, sebelum fraksi-fraksi membacakan usulannya para anggota Fraksi Partai Nasdem keluar ruangan (*walk out*) dan menyatakan tidak ikut bertanggungjawab atas UP2DP tersebut.

Melalui Ketua Fraksi Nasdem, Johnny G. Plate menyatakan sebagai sikap sebelumnya fraksinya tetap tidak setuju terhadap UP2DP tersebut dan menyatakan akan meninggalkan ruangan Rapat Paripurna. Akhirnya seluruh anggota Fraksi Nasdem meninggalkan ruang rapat.

Dari usulan UP2DP enam fraksi yakni FPG, F-Gerindra, FPAN, FPKS, FPKB, dan FPP membacakan usulannya lewat jubir fraksi masing-masing sementara Fraksi Partai Demokrat masih menunda pembacaan usulannya. Pada dasarnya mereka sepakat bahwa pengajuan usulan pembangunan Dapil adalah merupakan kewajiban DPR sebagaimana diatur dalam UU No.17 tentang MD3 untuk memperjuangkan dan menampung serta menindaklanjuti aspirasi rakyat. Selain itu anggota Dewan memiliki hak untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan yang selama ini belum terakomodir dalam program-program pembangunan yang ada.

“Usulan Program pembangunan Dapil merupakan terobosan penting dalam rangka akselerasi pemerataan pembangunan di pelosok-pelosok tanah air,” ungkap jubir FPG M. Misbakhun. (mp)/foto:iwan armanias/parle/hr

Polri Diminta Lebih Profesional dan Kuat Berantas Korupsi

Anggota Komisi III DPR Didi Suprianto mengharapkan ke depan kepolisian mampu menjawab tantangan pemberantasan korupsi dengan lebih profesional dan kuat, diimbangi dengan penyelamatan uang negara yang lebih besar lagi.

Harapan itu disampaikan dalam Raker Komisi III dengan Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di ruang rapat Komisi III DPR Kamis (2/7) siang.

Dalam acara yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Aziz Samsudin, Didi

lebih lanjut mengatakan, yang menjadi pemahaman kita korupsi bukan hanya menindak orang kemudian memasukan ke dalam penjara. Hakekat yang utama, bagaimana menyelamatkan keuangan negara dari tangan para koruptor.

Namun fakta yang ada, setelah dilakukan penindakan banyak uang negara tidak bisa diselamatkan. “Dalam kaitan itu kita berharap polisi mempunyai renstra yang komprehensif bagaimana mencegah atau meminimalisir potensi hilangnya keuangan negara,” katanya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat menegaskan, tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi itu menjadi penting. Pencegahan korupsi di setiap institusi penegak hukum juga sudah banyak yang dirumuskan, namun sejauh ini belum bisa mengerem laju tindak pidana itu juga belum kelihatan.

“Saya berharap, lembaga kepolisian bisa menjadi garda terdepan dan melahirkan sebuah konsep pencegahan yang langsung bisa berfungsi,” tegasnya. Seperti dikatakan Kapolri apabila diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana



Anggota Komisi III DPR Didi Suprianto

yang dimiliki KPK, akan bekerja maksimal.

Kapolri Badrodin Haiti mengatakan korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang menjadi perhatian seluruh masyarakat dan menjadi isu penting dalam penegakan hukum. Kewenangan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ada pada

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung dan Polri.

Dalam pemberantasan korupsi, Polri memiliki komitmen kuat yang dapat dilihat dari penanganan kasus korupsi pada periode 2014 sampai dengan bulan April 2015. Tahun 2014 kasus yang disidik sebanyak 1.654, target penyelesaian 543, dan tahun ini kasus yang disidik 1.067 target penyelesaiannya 898 kasus.

Kapolri membenarkan bahwa supervisi kegiatan dan penyelidikan Polri telah berjalan walaupun belum maksimal. Tim KPK turun ke jajaran Polri, melakukan supervisi sekaligus memberikan masukan dan bantuan dalam rangka kelancaran penanganan perkara tipikor oleh Polri. Demikian sebaliknya, penyidik Polri melaporkan penyelidikan/penyidikan maupun kemajuan penanganan kepada KPK. (Spy)

foto: andri/parle/hr



Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR Dedi Wahidi

Komisi X DPR RI menjaring pendapat dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Dinas Pendidikan Prov Sulawesi Selatan terkait pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut digelar di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Selasa. (30/06).

“Ini merupakan kunjungan yang kedua setelah kunjungan pertama ke Bengkulu pada 21 Juni terkait BOPTN,” kata Ketua Tim Komisi X Dedi Wahidi (FKB).

Dedi Wahidi mengatakan, Panitia Kerja (Panja) BOPTN Komisi X DPR dibentuk berdasarkan pemikiran dan mencoba mencari solusi adanya dis-

Panja BOPTN Komisi X Jaring Pendapat ke PTN Sulsel

paritas BOPTN dan membahas pemanfaatan BOPTN serta formulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mekanisme pembayarannya.

Dalam kesempatan itu, Rektor UNM Arismunandar mengatakan, persoalan BOPTN menjadi isu para pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam berbagai pertemuan. “Memang ada semangat PTN dengan adanya BOPTN ini, namun terasa ada ketidakadilan dalam besaran dana yang diberikan kepada setiap PTN.” ujarnya.

Lebih lanjut Aris mengatakan, bahwa sistem dan skema pemberian BOPTN selalu berpihak kepada BOPTN yang sudah maju. Jumlah BOPTN di PTN Kawasan Timur Indonesia nyaris sama dengan satu PTN di Kawasan Barat.

“Perguruan Tinggi yang dipimpinnya dengan jumlah lebih dari 30 ribu orang mahasiswa memperoleh BOPTN 18 milyar. Oleh karena itu, konsorsium PTN Indonesia Bagian Timur sedang menyiapkan naskah yang berkaitan dengan BOPTN ini.” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang menjelaskan, pihaknya memperoleh

BOPTN sebesar Rp. 45 miliar untuk dua kelompok yakni Engineering dan Tata Niaga. Sementara politeknik pertanian (politan) Pangkep memperoleh BOPTN Rp. 2,2 miliar pada tahun 2015 ini.

Kepala Biro Keuangan Universitas Hasanuddin Mukmin yang mewakili Unhas menjelaskan, pihaknya pada tahun 2013 memperoleh BOPTN Rp. 64 miliar, tahun 2014 Rp. 79 miliar dan tahun 2015 sebesar Rp. 92 miliar, termasuk Rp. 20 miliar untuk rumah sakit Unhas. “BOPTN ini realisasinya mencapai 92 %,” ujar Mukmin.

Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Aries Tina mengharapkan pertemuan ini ada tindak lanjutnya dalam bentuk perubahan kebijakan yang berkaitan dengan BOPTN ini. “Semoga bisa secepatnya ditindak lanjuti apalagi pertemuan ini berlangsung dalam dialog yang penuh kreatif,” ujar Dwia.

Ketua Tim Panja BOPTN Komisi X DPR Dedi Wahidi berharap kedepannya jangan sampai ada perbedaan antara Timur, Barat dan Jawa terkait dengan penerimaan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). (hr) foto: eka hindra/parle/hr



Terkait Tata Kelola Migas, Satya Usulkan Klausul *Modern Hybrid Stabilisation*



Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha

Terkait tata kelola Migas agar menjadi lebih baik kedepannya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengu-

sulkan mekanisme penerapan *modern hybrid stabilisation clause*, dengan cara ini diharapkan dapat saling menguntungkan baik negara maupun kontraktor migas.

“Klausul ini melindungi kepentingan investor dengan menyeimbangkan manfaat atau mempertahankan keseimbangan ekonomi dari tanggal efektif kontrak,” jelasnya saat menjadi pembicara Konferensi *Natural Resources Governance Institute* (NRGI) di Oxford, Inggris, belum lama ini.

Menurutnya, kontrak tersebut mengatur penyesuaian otomatis dengan cara tertentu ketika *economic equilibrium* kontrak terganggu. Contohnya, jika pemerintah yang meningkatkan pajak, kontrak akan secara otomatis menyesuaikan bagian minyak mentah

untuk mempertahankan keseimbangan ekonominya. Namun, hal itu juga perlu dilengkapi dengan *Negotiated Economic Balancing Clause*.

Pada kesempatan itu, Satya, sebagai pembicara di NRGI Oxford, Inggris, diundang langsung oleh NRGI tersebut berbicara bersama Philip Daniel (*Chair, Advisory Board, Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies*), Anthony Paul (*Principal Consultant, Association of Caribbean Energy Specialists*), Carole Nakhle (*Director, Crystal Energy, UK*), dan Salli A. Swartz, (*Partner, Artus Wise*). NRGI adalah lembaga independen yang bertujuan ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari minyak dan gas bumi, serta sumber mineral. (Si) foto: iwan armanias/parle/hr

Pemerintah Diminta Lebih Serius Tangani Korban Lapindo

Anggota DPR Sungkono mendesak Pemerintah betul-betul serius menangani korban lumpur Lapindo. Kalau Pemerintah jauh-jauh hari sudah punya kesiapan untuk menyelesaikan, maka tidak terjadi penundaan sebab itu masalah teknis. Banyak instansi terkait yang dilibatkan. Masyarakat juga sudah mendengar janji Presiden tanggal 26 Juni harus dibayar semua, namun kenyataannya hingga sekarang belum juga dibayarkan.

“Ini sangat menyedihkan sebab masyarakat sudah 9 tahun lebih, betul-betul menderita. Karena itu Pemerintah harus lebih serius menangani korban Lapindo ini,” kata Sungkono, Kamis (2/7) di Senayan, Jakarta.

Hal itu dikatakannya menanggapi pernyataan Wapres Jusuf Kalla bahwa dana talangan sebagai ganti rugi terhadap korban semburan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), akan diberikan setelah verifikasi data penerima selesai. “APBN sudah tersedia, siap disalurkan. Namun perlu diverifikasi siapa saja yang berhak menerimanya, supaya jangan nanti yang menerima justru yang tidak berhak,” kata JK Se-

lasa pekan lalu.

Komitmen Pemerintah kata politisi PAN ini sangat ditunggu, sebab Presiden Jokowi berjanji akan hadir menyelesaikan kasus Lapindo dan sesuai Nawacita, akan melindungi segenap masyarakat Indonesia. Untuk menyelesaikannya jangan parsial, karena saat pembahasan APBN Perubahan 2015 Komisi XI DPR dengan Kemenkeu jumlah dana yang disiapkan BPLS baru Rp 781 miliar.

Menurut Sungkono, jumlah dana tersebut dinilai tidak cukup, jangan sampai tahun ini tidak disiapkan, karena ada korban lain di lapangan belum diselesaikan, khususnya kelompok bisnis to binis. Padahal keputusan MK tidak ada, dan dinyatakan bahwa semua korban dalam areal peta terdampak dibiayai atau ditalangi oleh negara.

Sepengetahuan Sungkono jumlah seluruhnya itu 1,58 triliun termasuk di dalamnya ada pengusaha. Maka kalau yang akan dibayarkan 781 M masih kurang sekitar 750 M lagi. Untuk itu dalam pembahasan RAPBN 2016 ini setidaknya harus juga menjadi bagian tak terpisahkan dari UU APBN



Anggota Komisi XI DPR Sungkono

2015. “Itu sudah saya sampaikan dalam Rapat Paripurna yang lalu. Jangan lagi pemerintah melupakan itu,” ujarnya.

Kalau melupakan itu berarti Pemerintah tidak paham dengan keputusan MK, dan tidak melindungi rakyatnya. Korban Lapindo sudah kehilangan seluruh tanah dan tempat tinggalnya.

Dia menekankan pada RAPBN 2016 harus dianggarkan lagi untuk korban Lapindo, sementara untuk warga yang sudah dianggarkan APBN 2015 secepatnya dicairkan jangan mundur lagi. “Untuk warga, dana yang Rp 781 miliar harus segera dicairkan. Kalau bisa sebelum lebaran ini,” tegas Sungkono.

Masalah ini, kata anggota DPR asal Sidoarjo ini, diharapkan menjadi atensi pemerintah supaya tidak lalai, abay dan melakukan pembiaran. “Saya minta

dimasukkan, sesuai rencana kerja BPLS. Data yang saya terima dari BPLS tahun 2016 akan menempatkan anggaran untuk pengusaha. Jangan sampai ka-

rus lumpur Lapindo bergulir jadi isu politik,” kata Sungkono mengingatkan. (mp)/foto:jaka/parle/iw.

RUU PPNPI Berikan Perlindungan Bagi Nelayan Tradisional



Anggota Komisi IV DPR Rofi Munawar

Anggota Komisi IV DPR Rofi Munawar mengharapkan pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan (PPNPI) menitikberatkan kepada perlindungan serta pemberdayaan nelayan kecil dan tradisional. Yang dititikberatkan diantaranya yaitu, perlindungan mulai profesi nelayan sebagai subjek maupun hasil tangkapan (ikan) sebagai objek. “Selama ini nelayan tradisional dan kecil di Indonesia memiliki resiko yang sangat besar saat melakukan aktivitas melaut, bukan hanya karena alat tangkap dan perahu yang berukuran kecil namun aspek

perlindungan yang lemah dari otoritas pemerintah terkait hasil tangkapan,” jelas Rofi Munawar di Gedung DPR RI, baru-baru ini.

RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan masuk dalam rancangan program legislasi nasional (Prolegnas) 2015–2019 merupakan inisiatif DPR, diharapkan RUU ini dapat memberikan proteksi maksimal dan peningkatan kesejahteraan terhadap nelayan kecil tradisional.

Rofi menjelaskan, salah satu cara untuk mengurangi resiko bagi para nelayan tradisional dan kecil yaitu dengan memberikan asuransi bagi nelayan, karenanya perlu dipikirkan terobosan dan formula yang tepat dalam merumuskan kebijakan asuransi jenis ini.

Adapun masalah yang dihadapi sektor budidaya ikan berada pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan pakan yang terjangkau, ketersediaan bibit, dan akses permodalan. Selain itu efisiensi produksi juga merupakan permasalahan dalam budidaya perikanan, hal ini disebabkan karena belum banyak digunakan inovasi teknologi dalam budi daya ikan.

“Dilihat dari substansi pengaturan

perlindungan dalam draf RUU PPNPI sudah sangat baik. Setidaknya sudah mencakup perlindungan prasarana dan sarana produksi, jaminan risiko usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan bantuan di wilayah perbatasan dan lintas Negara,” jelasnya

Legislator dari Jatim VII ini menambahkan, sebagian besar nelayan Indonesia adalah nelayan kecil dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang rendah, selain itu, dalam melakukan kegiatannya mereka menggunakan alat tangkap yang terbatas, dan modal produksi yang tidak memadai. Ironisnya, nelayan-nelayan itu juga hidup di tengah ancaman pencurian ikan, *overfishing*, kelangkaan sumber daya ikan, perubahan iklim serta masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi tersebut.

“Selama ini juga sering terjadi adanya penangkapan dan tindakan hukum atas pelanggaran tapal batas oleh nelayan tradisional baik lintas daerah maupun negara, sehingga ada baiknya RUU PPNPI mampu mengatur terhadap berbagai proses perlindungan atas kasus-kasus seperti itu,” jelas politisi dari Fraksi PKS ini. (Si) foto: rizka/parle/hr

Komisi IX DPR Desak Pemerintah Pusat Perhatikan Daerah Terpencil

Tim Kunker spesifik Komisi IX DPR mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan memberikan perhatian terhadap fasilitas kesehatan dasar di daerah perbatasan dan terpencil. Pasalnya saat menyerap aspirasi jajaran kesehatan di Kaltim masih ditemukan kondisi sarana maupun prasarana di daerah Mahakam Hulu dan Kutai Timur yang memprihatinkan.

Hal itu mengemuka saat Komisi IX

DPR yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri bertemu dengan Dinas Kesehatan Kaltim dan jajarannya, di Balikpapan, Senin, (29/6).

“Ada kesan yang ditangkap Komisi IX bahwa perhatian Pemda Kaltim terhadap kesehatan masih kurang dan belum menggembirakan,” jelas politisi Golkar ini kepada wartawan.

Menurutnya, berdasarkan UU Kesehatan pemkot maupun kabupa-

ten harus menganggarkan atau menargetkan 10 persen untuk kesehatan, sementara untuk nasional sebesar 5 persen. Namun faktanya, Kutai Timur masih di bawah 3 persen.

“Kepala dinasny juga melaporkan bahwa fasilitas atau kondisi pelayanan kesehatan didaerahnya dari 10 Puskesmas hanya satu yang permanen sisanya sembilan tidak permanen, ini sangat menyedihkan,” ungkapnya.

Melihat hal itu, lanjutnya, menun-

jukkan bahwa pemerintah daerah dan pusat masih belum memberikan perhatian serius terhadap sektor kesehatan.

Dia menambahkan, khusus wilayah Mahakam hulu yang merupakan daerah perbatasan pelayanan kesehatannya bahkan sangat menyedihkan. “Jika sakit masyarakat disana kecenderungannya berobat ke Malaysia atau negara tetangga terdekat,” jelasnya.

Dia menegaskan, persoalan kesehatan harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah. “Daerah terpencil atau terisolasi



Wakil Ketua Komisi IX DPR Syamsul Bachri

seperti perbatasan perlu ada afirmasi langsung dari pemerintah atau perhatian seperti melakukan pengadaan kesehatan yang semakin baik di wilayah itu,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah bisa meningkatkan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk daerah prioritas seperti terpencil dan perbatasan. “Jadi BOK diperbesar pada daerah tertentu yang kesulitannya tinggi seperti medannya berat dibandingkan daerah yang berada dipertanian,” katanya. (Si) foto: sugeng/parle/hr

Sambut Idul Fitri PIA DPR Gelar Pasar Murah



Ketua PIA, Deisti A Novanto didampingi Ketua DPR RI Setya Novanto ikut berpartisipasi menjual sembako

Ada pemandangan berbeda di Lobi Gedung Nusantara II pada hari ini, Rabu (1/7), ramai dan penuh dengan berbagai produk, mulai dari makanan, pakaian dan berbagai asesoris wanita, bahkan sembilan bahan pokok (sembako). Ya, Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI hari itu tengah berbagi kebahagiaan lewat Pasar Murah atau Bazar.

Dalam sambutannya, Ketua PIA, Deisti A Novanto mengatakan bahwa PIA sengaja menggelar pasar murah ini setiap tahunnya, khusus di bulan suci Ramadhan. Tujuannya,

selain untuk meningkatkan rasa kebersamaan di kalangan anggota PIA, juga untuk meningkatkan rasa solidaritas terhadap sesama, terlebih lagi menjelang hari raya Idul Fitri berbagai harga di pasaran cukup meningkat. Disamping itu juga untuk menggairahkan Usaha kecil Menengah (UKM).

“Awalnya kami membatasi jumlah peserta hanya 50, namun banyaknya permintaan hingga kemudian hanya 74 stand yang bisa kami sertakan dalam pasar murah ini. Adapun stand-stand tersebut terdiri dari sembako, makanan ringan, pakaian serta asesoris tradisional. Dan kami sengaja meminta agar para peserta bazaar memberikan harga di bawah harga pasar, karena sesuai namanya pasar murah, tentu harga yang dikenakan juga harus murah,” ujar Deisti.

Ditambahkan Ketua Panitia Pelaksana Pasar Murah, Yayuk Dossy Iskandar mengatakan bahwa kepesertaan stand bazaar atau pasar murah ini selain BUMN (Badan usaha milik Negara) yakni bulog lewat beras murah, dan Bank Mandiri, juga dapat dijadikan ajang promosi bagi UKM. Sehingga UKM tidak hanya memperoleh transaksi saat bazaar melainkan juga transaksi reguler setelah kegiatan ini.

“Dalam acara ini juga akan menampilkan berbagai tips untuk para ibu rumah tangga dalam membuat menu makanan sehat bergizi yang berasal dari bahan makanan yang relatif murah,” tambah Yayuk. (Ayu) foto: denus/parle/hr

Hardisoesilo Sarankan Panja RUU Karantina Cari Terobosan Baru

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hardisoesilo menyarankan Panja RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan untuk mencari tero-

bosan baru terkait format lembaga perkarantinaan satu atap yang akan dituangkan dalam penyusunan RUU inisiatif DPR RI itu.

“Dalam perspektif ke depan, kita harus mencari terobosan-terobosan dalam penyusunan RUU ini semisal mengintegrasikan perkarantinaan dengan sektor-sektor di luar yang selama ini telah terkait,” ujar Hardisoesilo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung DPR Jakarta, Selasa (30/6), di Gedung Nusantara



Anggota Komisi IV DPR Hardisoesilo

DPR, Jakarta.

RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Ibnu Multazam itu dalam rangka menghimpun masukan-masukan untuk penyusunan naskah akademik dan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang merupakan perubahan atas UU No 16 tahun 1992. RUU ini merupakan usul inisiatif DPR dan masuk dalam daftar prioritas Prolegnas 2015.

Menurut Hardisoesilo, kalangan Komisi IV memang masih terus mendiskusikan tentang masalah kelembagaan perkarantina ini karena selain melibatkan sejumlah instansi teknis seperti Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan yang masing-masing mempunyai karantina sendiri-sendiri, juga bagaimana format dan mekanisme kerjanya yang efektif dan efisien.

Lebih lanjut dia mencontohkan

adanya kegamangan dalam lingkup tugas perkarantina yang berkaitan dengan bahan dasar makanan dan olahan. “Contohnya mana tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan karantina untuk ikan yang masuk di industri makanan kalengan?” ujarnya.

Selain itu, masih kata Hardisoesilo, juga harus ada kejelasan dimana seharusnya posisi perkarantina saat perangkat bea cukai dan keimigrasian bekerja di pintu-pintu masuk dan keluar barang/komoditas pada pelabuhan atau bandara.

Sejumlah legislator mewacanakan agar lembaga perkarantina itu selain menyatukan sejumlah institusi sejenis yang tersebar di beberapa kementerian, juga diharapkan langsung berada di bawah Presiden RI sehingga kuat secara kelembagaan serta memiliki kewenangan yang lebih luas.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Narmoko Prasmadji menuturkan bahwa masalah karantina ini sangat erat kaitannya dengan menegakkan kedaulatan dan kewibawaan negara.

“Begitu ada barang/komoditas atau lalu lintas orang yang turun di pintu masuk pelabuhan atau bandara, maka custom, imigrasi dan karantina secara bersamaan harus menjadi garda terdepan,” ujarnya.

Ditegaskannya bahwa pada era perdagangan bebas saat ini, maka semua komoditas tidak boleh lagi ada hambatan untuk masuk. Namun untuk

masalah kedaulatan, jika ada ancaman terhadap sumberdaya di negara tersebut, maka itu bisa dibantu melalui instrumen perkarantina.

Karenanya, menurut Narmoko yang juga Dirjen Perikanan Tangkap KKP itu, saat ini semua negara di dunia sedang mempelajari bagaimana memberikan proteksi maksimal untuk negara masing-masing.

“Jadi kami sangat menyambut baik adanya RUU ini yang akan menunjukkan bahwa Indonesia punya wibawa di mata regional dan internasional,” ujarnya seraya menekankan bahwa RUU ini sangat strategis karena tidak hanya mampu melindungi resources nasional, tetapi juga menjaga kedaulatan serta wibawa negara.

Senada dengan Narmoko, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut Hutagalung menuturkan bahwa perkarantina ini juga merupakan simbol dari kedaulatan sebuah negara. Karenanya, banyak negara maju seperti Australia, yang tidak mentolerir sekecil apapun resiko masuknya hama, penyakit dan organisme pengganggu tanaman ke negaranya.

Untuk konteks Indonesia, ia berpendapat, ketatnya persyaratan dalam perkarantina itu diharapkan pula tidak sampai menghambat arus perdagangan masuk dan keluar Indonesia.

“Analisa resiko yang fair dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu jadi acuan untuk menerima atau menolak barang/komoditas yang mau masuk ke Negara ini,” ujarnya. (Agung)

foto: rizka/parle/hr

Komisi IV Apresiasi Mentan Tingkatkan Produksi Pangan

Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian dalam menjaga peningkatan produksi pangan saat musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan agar swasembada pangan tercapai dengan tak lagi mengimpor dari negara lain.

“DPR akan mendukung upaya Kementerian Pertanian menjaga peningkatan produksi pangan, sehingga swasembada pangan bisa terwujud,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, saat Kunjungan Kerja Ber-

sama Menteri Pertanian dan Komisi IV DPR RI di Cirebon dan Indramayu, Selasa (30/6). Acara ini dalam rangka meninjau daerah-daerah rawan terhadap potensi terjadinya kekeringan sehingga terindikasi akan terjadinya puso atau gagal panen.

Herman Khaeron menjelaskan endemik kekeringan ini terjadi setiap tahun ketika musim kemarau panjang apalagi sekarang ada prediksi terjadinya el nino skala sedang sampai bulan November. Meski endemik kekeringan

di wilayah Cirebon dan Indramayu dimana DPR telah menganggarkan dana alokasi terjadinya puso, namun tidak bisa dibiarkan terus menerus terjadi, sehingga Komisi IV bersama Menteri Pertanian mencari jalan untuk memberikan tindakan preventif dan jangka panjang.

Karena potensinya ada maka dalam jangka pendek pompa diharapkan mampu mendorong ketersediaan air. Sedangkan untuk daerah rawan kekeringan dan rawan puso yang terindi-



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron didampingi Menteri berdialog dengan petani di Indramayu

kasi akan sulit mendapatkan sumber air, embung atau situ adalah salah satu solusi yang dapat dikembangkan ke depan. “Karena itu ke depan Komisi IV meminta Menteri Pertanian untuk mempersiapkan kajian jumlah keperluan embung yang efektif mengairi

luas sawah yang ada,” kata Herman. Menurutnya, salah satu yang akan dijadikan percontohan adalah di Cirebon dan Indramayu, karena merupakan daerah endemik kekeringan yang setiap tahun terjadi maka akan dicoba sistem embung ini. Diharapkan upaya

itu menjadi solusi permanen jangka panjang dengan dukungan pemompaan yang cukup efektif di berbagai genangan air yang ada.

“Anggaran pertanian cukup memadai untuk hal tersebut, dengan ketersediaan anggaran tahun ini Rp32 Triliun dan tambahan anggaran mencapai Rp13 Triliun, mudah-mudahan ini efektif menyelesaikan permasalahan yang selalu dihadapi para petani,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Herman juga mengapresiasi langkah cepat Kementan dalam menstabilkan harga pangan. Apalagi, langkah pengendalian harga tersebut tidak dilakukan melalui impor pangan dari negara lain. “Pangan tidak boleh impor kalau produksi dalam negeri cukup. Saya apresiasi upaya menstabilkan harga dan meningkatkan produksi,” tandas Herman Khaeron.

(as) Foto: Agung/parle/hr

Reshuffle Kabinet PR Presiden, Jangan Diambil Alih

Anggota DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, penggantian menteri (reshuffle) itu adalah pekerjaan rumah (PR) Presiden. Posisi kita hanya memberi saran sehingga jangan sampai PR Presiden diambil alih. “Kita hanya memberikan saran, untuk menghadapi kondisi seperti itu memerlukan figur ini. Setelah itu silahkan Presiden buat keputusan,” kata Hendrawan sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR, Rabu (1/7).

Beberapa hari terakhir, wacana reshuffle kembali menghangat setelah 6 bulan Kabinet Kerja menjalankan tugasnya menyusul tidak tercapainya target-target pembangunan. Wacana itu semakin kencang menyusul adanya Menteri Kabinet Kerja yang menjelekkan Presiden Jokowi.

Menurut Hendrawan, masalahnya di Indonesia, jabatan menteri begitu sakral sehingga kalau ada pergantian pejabat seperti ada gempa bumi politik. Padahal itu wajar-wajar, seperti di AS menteri pertahanan digeser Menlu, Menlunya digeser, itu hal biasa.

Kalaupun nanti Presiden mengganti Menteri bukan dari KIH tetapi dari

KMP, dalam pandangan Politisi PDI Perjuangan ini juga wajar, agar Kabinet dapat dukungan lebih besar di parlemen. Bahkan dia mengusulkan lebih dahsyat lagi, dengan membedakan syarat perlu dan cukup.



Anggota DPR Hendrawan Supratikno

Kalau syarat perlu (*necessary condition*), yang penting integritasnya, kompetensi dan *leadership*nya. Kalau syarat cukup (*substitution condition*), bagaimana dukungan politik, jaringan

tokoh yang bersangkutan.

“Jadi jangan dilihat partai atau golonganannya, tetapi syarat perlu itu. Memiliki *passion* untuk melaksanakan tugas,”. Ditanya siapa kader KMP yang dipilih Presiden menjadi menteri, Hendrawan mengatakan Presiden tahu siapa orang yang layak, masuk radar. Yang penting syarat perlunya itu dulu,” kilahnya.

Pers mempertanyakan mengapa Mendagri Tjahyo Kumolo yang mengungkap adanya menteri yang menjelekkan presiden, Hendrawan mengatakan, Tjahyo sangat alergi. Bagaimana kontribusi mantan Sekjen PDIP di partai, maka begitu terjadi penyimpangan orang-orang yang tidak tegak lurus dengan pimpinannya lalu bereaksi keras.

“Hal itu wajar sebab kader-kader PDIP sangat menghormati loyalitas. Maka begitu ada deviasi atau penyimpangan orang tidak loyal dan mengatakatain yang tidak pasti, bukan hanya Tjahyo maka segenap kader PDIP akan memberikan penilaian,” pungkas Hendrawan. (mp)/foto:jaka/parle/hr

RUU Disabilitas Bentuk Keberpihakan DPR Terhadap Penyandang Disabilitas

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa Amaliah memastikan RUU Penyandang Disabilitas yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2015 ini akan dirumuskan DPR dengan keberpihakan penuh kepada para penyandang disabilitas.

“Jadi, kami pastikan para penyandang disabilitas tidak otomatis masuk ke panti-panti, tetapi kami akan merumuskan akan lebih ditekankan kepada kepedulian keluarga dan lingkungannya,” kata Ledia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/6), dalam acara Forum Legislasi bertajuk “RUU Disabilitas” bersama Guru Besar UI Prof Dr Irwanto dan Dirjen Rehabilitasi Kemensos, Samsudi.

Sejauh ini, menurut dia, RUU ini baru dalam proses perumusan draf yang akan menjadi usul inisiatif DPR. “Kami berharap sebelum berakhir masa sidang ini, sudah bisa diharmonisasi agar bisa segera disetujui menjadi draf DPR. Kami sudah bisik-bisik ke pihak Kementerian Sosial, kalau sudah disetujui di tingkat I, mesti cepat-cepat disebut pembahasannya. Bisa dipastikan *leading sector* ada di Kemosos, meski di negara-negara lain diserahkan kepada Kementerian Kesehatan,” ujar politisi dari FPKS itu.

Menurut Ledia, satu hal penting dari pembahasan materi UU ini adalah mengenai pembentukan Komite Nasional yang diharapkan dapat mengawasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas nantinya. “Kami berharap Komite Nasional itu nanti dapat mengendors cara pandang pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu Guru Besar UI Prof Dr Irwanto menilai perhatian negara terhadap para penyandang disabilitas (cacat) masih sangat kurang. hal-hal mendasar seperti penggunaan huruf braille dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), negara tidak pernah memfasilitasinya.

“Dulu waktu Presidennya Gus Dur dan Presiden SBY, jalan bidang miring untuk penyandang disabilitas dengan kursi roda, ada tuh. Sekarang sudah tidak ada, saya lewat situ harus diangkat seperti tandu Jenderal Sudirman,” katanya.

Menurut Irwanto, seharusnya, tempat penting seperti itu ada fasilitas buat kaum disabilitas, kalau tidak bidang miring bisa juga model *lift*. Hal semacam ini seperti meneguhkan anggapan masyarakat, istilah penyandang cacat adalah



Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ledia Hanifa Amaliah dalam acara Forum Legislasi

bicara makhluk setengah manusia. “Padahal seharusnya tidak boleh diskriminasi, dan kaum disabilitas merupakan sosok yang sering punya kelebihan luar biasa,” katanya.

Ia menganggap pemerintah juga masih sangat lemah dalam mengadakan data untuk memetakan berapa sebenarnya jumlah penyandang disabilitas yang ada. Dia menenggarai, persoalan ini karena tidak dianggap penting sehingga datanya tidak selalu diperbarui. “Akibatnya hanya ditemukan 2-3 persen saja pertahunnya dari jumlah penduduk yang ada. Itu pun menggunakan data tahun 2010,” katanya.

Di tempat yang sama, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Kemensos, Samsudi, menyatakan, memang fasilitas dari negara buat kelompok disabilitas masih minim. Sampai saat ini masih sangat besar. Bahkan, untuk hal-hal mendasar seperti penggunaan huruf braille dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), negara tidak pernah memfasilitasinya. “Mereka punya KTP, tapi tidak pernah tahu keterangan dan status dirinya di KTP itu, sebab tidak ditulis dalam huruf braille,” ujarnya. (nt/sc)

Foto: Naefuroji/parle/hr



Anggota Komisi VI DPR Melani Leimena Suharli

PKBL Diharapkan Gerakkan Sektor Riil

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari sejumlah BUMN diharapkan mampu menggerakkan usaha kecil menengah (UKM) di berbagai daerah. Banyak pelaku UKM sangat berharap pada PKBL yang merupakan bagian dari *program corporate social responsibility* (CSR).

Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli mengemukakan hal tersebut di hadapan rapat Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, Selasa (30/6). Menurut Melani, di tengah kelesuan ekonomi saat ini, PKBL bisa menjadi tumpuan masyarakat kecil dan para pelaku

UKM. Bantuan itu bisa berupa pinjaman dan pembinaan. Ini adalah bentuk kemitraan yang ideal.

“Untuk pembinaan UKM terutama di dapil Jakarta tidak ada pengelola pertanian dan industri, tapi PKBL-nya sangat berfungsi untuk mengangkat usaha kecil menengah dan juga pembinaan lingkungan kepada masyarakat. Contohnya, pembuatan MCK bagi

masyarakat miskin kota. Makin lama penduduk Jakarta, kan, makin banyak. Sarana MCK jadi kebutuhan yang sangat mendesak. Pengangguran pun mulai banyak bermunculan. Dengan PKBL diharapkan bisa menggerakkan sektor riil dan UKM di tengah masyarakat,” ungkap Anggota F-PD ini.

Kepada Menteri BUMN, mantan Wakil Ketua MPR RI ini mengimbau,

agar BUMN memperhatikan hal-hal kecil dalam membangun sarana dan fasilitas publik. Selama ini toilet-toilet di bandara dan fasilitas publik di perusahaan plat merah berbau dan kotor. Padahal untuk memahami karakter seseorang dengan baik bisa dilihat dari kebersihan toilet di lingkungannya.

(mh) Foto: Jaka Nugraha/parle/hr

Pekerja Asing Meningkat, Komitmen Pemerintah Dipertanyakan

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berasal dari Tiongkok menunjukkan pemerintah tidak mampu menjaga komitmen untuk sebesar-besarnya menggunakan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik perkembangan kondisi ini secara transparan termasuk kerja sama yang dijalin dengan Pemerintah Tiongkok.

“Keberpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja lokal patut dipertanyakan. Disaat tingkat pengangguran terus meningkat dari 5,7% tahun 2014 menjadi 5,81% tahun 2015, pemerintah justru membuka kesempatan kerja kepada tenaga kerja asing. Tenaga lokal menjadi sulit bersaing karena faktor keterampilan dan pendidikan. Akhirnya, tenaga kerja lokal hanya mengisi lapisan bawah profesi pekerjaan seperti buruh, asisten supervisor. Sedangkan lapisan atas mulai didominasi tenaga kerja asing asal Tiongkok, ini menyedihkan,” kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/15).

Ia menilai bertambahnya tenaga kerja asal Tiongkok bersamaan dengan

pinjaman sebesar Rp520 triliun perlu didalami. Pinjaman itu akan diberikan kepada sejumlah BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur. Niat Pemerintah Tiongkok memberi pinjaman yang fantastis itu tentu tidak cuma-cuma. Laporan dari Labour Institut Indonesia, patut diduga akan datang tenaga kerja Tiongkok besar-besaran ke tanah air pasca ditanda tangannya pinjaman infrastruktur tersebut.

Kondisi ini baginya menunjukkan Pemerintah Jokowi-Kalla tidak peka, sepertinya membiarkan warganya teraniaya dan terbunuh diluar negeri, ketimbang memberi mereka tempat bekerja yang layak di rumahnya sendiri. Data BNP2TKI tahun 2015 menunjukkan jumlah TKI yang mencari kerja ke luar negeri meningkat 29%.

“Pada akhirnya, proyek infrastruktur besar-besaran yang diusung Jokowi-Kalla tidak akan berjalan sesuai dengan janjinya yang sebesar-besarnya menggunakan tenaga kerja dan bahan baku lokal. Proyek infrastruktur akan kembali menjadi siklus sesat, teknologi dari mereka, tenaga kerja bahkan bahan baku dari mereka. Akhirnya uang pinjaman infrastruktur hanya ilusi



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

karena tidak akan pernah tinggal di tanah air,” tandasnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat IV ini mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga komitmen menggunakan sebesar-besarnya tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastruktur. “Tenaga kerja lokal yang profesional dan jago sudah banyak, kenapa harus pakai tenaga kerja asing yang kualitasnya justru lebih buruk,” demikian Heri. (spy/iky) foto: iwan armanias/parle/hr

Pimpinan Pansus RUU Paten Ditetapkan

Anggota Komisi III John Kenedy Azis terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Paten. John Azis terpilih berdasarkan kesepakatan rapat tertutup yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (F-PAN), di ruang

rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Selasa (30/06/15).

Terpilih sebagai Wakil Ketua Pansus, yakni Anggota Komisi III DPR Risa Mariska (F-PDI Perjuangan), Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto (F-PD), dan Anggota Komisi III DPR Sarifuddin

Suding (F-Hanura).

“Apakah susunan Pimpinan Pansus ini dapat disepakati,” tanya Taufik kepada seluruh perwakilan fraksi yang hadir. Jawaban setuju pun diberikan, sembari Taufik mengetukkan palu persetujuan.

Mengingat pentingnya RUU Paten ini, Taufik berharap kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Paten agar dapat bekerja secara maksimal dan sesuai dengan target yang disepakati.

“Kita harapkan Pansus RUU Paten bisa langsung bekerja,” imbuhan Politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

John yang terpilih sebagai Ketua Pansus RUU Paten ini meminta kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus untuk sungguh-sungguh, dan saling bekerjasama dalam penyusunan RUU Paten. Apalagi, tambahnya, saat ini DPR sangat disorot oleh publik terkait kinerjanya yang kurang memuaskan.

“Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa dugaan itu tidaklah benar. Karena itu, saya minta dukungan dari seluruh anggota Pansus, apa yang menjadi amanah ini, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya,” harap politisi



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berdialog dengan Anggota Pansus RUU Paten

asal Dapil Sumatera Barat II ini.

Sebagaimana diketahui, RUU Paten masuk ke dalam Program Legislasi Na-

sional (Prolegnas) Prioritas 2015. (sf/

foto:iwan armanias/parle/hr

Komisi I Resmi Dukung Sutiyoso



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dan Calon Kepala BIN Sutiyoso

Rapat pleno Komisi I DPR RI secara resmi menyampaikan dukungan kepada calon Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) pilihan Presiden Jokowi. Sepuluh fraksi yang ada di komisi yang membidangi masalah pertahanan ini secara bulat menyampaikan kesepakatan.

“Dengan demikian Komisi I dalam proses pemberian pertimbangan memutuskan menerima dan mendukung Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai Kepala

BIN dan pertimbangan Komisi I akan disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk dibawa ke forum rapat paripurna dan ditetapkan sebagai keputusan DPR,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/15).

Ia menambahkan seluruh proses tata cara seleksi dan pemberian pertimbangan calon Kepala BIN sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Tata Tertib DPR pasal 198. Langkah itu di-

antaranya pemeriksaan persyaratan administrasi, penyampaian visi dan misi, pemberitahuan kepada publik dan rapat pendalaman terhadap visi dan misi kandidat.

Pada saat pembukaan sidang Mahfudz meminta persetujuan peserta rapat apakah proses uji kepatutan dan kelayakan berlangsung tertutup atau terbuka. Anggota Komisi I dari FPDIP Effendi Simbolon mengusulkan rapat dibagi dua bagian, penyampaian visi misi kandidat dilaksanakan terbuka sedangkan pendalaman berlangsung tertutup. Usulan ini diterima seluruh peserta sidang.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais pada kesempatan berbeda menyampaikan sejumlah isu penting menjadi perhatian Komisi I pada saat rapat pendalaman visi dan misi. Kasus pelanggaran batas wilayah negara, trend keamanan dunia, isu separatisme dan terorisme.

“Soal kasus HAM Kuda Tuli ada anggota yang bertanya tetapi sekedar memberikan catatan dan ini sudah dianggap selesai secara hukum pada tahun 2003 lalu. Pada dasarnya saya menilai semangat Komisi I ingin melihat masa depan daripada masa lalu,” tutur dia.

Letjen (Purn.) Sutiyoso memulai



paparan visi misinya dengan memperkenalkan diri. “Nama saya Sutiyoso lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1968. Penugasan militer saya 29

tahun dan 23 tahun di Kopassus, sebagian besar di satuan Sandi Yudha yang penugasannya di bidang intelijen.”

Soal independensi ia berujar, “Bagi

saya bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan individu, ini adalah harga mati,” tegas dia. (iky) foto: andri/parle/hr

Komisi I Berhasil Pilih 17 Anggota LSF

Rapat pleno tertutup Komisi I DPR RI berhasil memilih 17 anggota Lembaga Sensor Film (LSF) dari 34 kandidat yang mengikuti uji visi dan misi. Proses penetapan berlangsung dengan mekanisme musyawarah mufakat dan setelah dilaporkan dalam rapat paripurna, hasil akhir segera disampaikan kepada presiden.

“Alhamdulillah Komisi I sudah menyelesaikan proses pemberian pertimbangan 17 nama anggota LSF untuk disampaikan kepada presiden. Dari 17 nama yang disepakati ada kandidat yang disampaikan presiden sebelumnya dan ada juga dari 17 nama lain yang disusulkan Presiden Jokowi,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (29/6/15).

Politisi Fraksi PKS ini menyebut rapat pleno komisi sepakat untuk menghindari pemungutan suara dalam pengambilan putusan. Diharapkan semangat kebersamaan ini menjadi awal

yang baik bagi LSF untuk melakukan penataan organisasi.

“Masalah yang dihadapi lembaga ini sudah cukup lama dan ini mengganggu efektifitas kerja mereka. Kita menghindari betul pemilihan nama dengan voting, penilaian diberikan dengan memperhatikan visi misi yang telah disampaikan,” tekannya.

Sejumlah pertimbangan menjadi perhatian komisi yang baru saja ditetapkan menjadi mitra kerja LSF ini diantaranya keseimbangan gender - pria dan wanita. Untuk menjaga kesinambungan organisasi dipilih pula anggota terbaik pada periode sebelumnya.

Lebih jauh wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar VIII ini mengaku belum sepenuhnya puas dengan hasil akhir pemilihan. Namun pilihan tentu tidak boleh keluar dari 34 nama yang telah dikirimkan pemerintah kepada DPR.

“Saya pikir LSF sudah melewati per-



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

panjangannya cukup lama dan inilah pertimbangan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan presiden bisa menindaklanjutinya sesegera mungkin,” demikian Mahfudz.

Sampai berakhirnya rapat pleno tertutup Komisi I, wartawan belum dapat mengakses nama 17 anggota LSF terpilih. Sekretariat menyebut data belum dapat diumumkan kepada publik karena belum ditandatangani secara lengkap oleh seluruh pimpinan.

(iky) foto: naefuroji/parle/hr

Komisi VIII Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Baznas



Anggota Komisi VIII DPR Trimurni

Komisi VIII DPR RI mempertanyakan langkah yang akan ditempuh para calon anggota Baznas untuk memaksimalkan peran Badan amil zakat nasional (Baznas) dalam pengelolaan zakat umat. Hal tersebut terangkum dalam *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) calon anggota Baznas, Senin (29/6) di ruang rapat Komisi VIII DPR RI.

“Langkah-langkah apa yang akan diambil jika terpilih menjadi anggota Baznas, agar zakat bisa berperan dalam mengatasi kemiskinan,” tanya anggota Komisi VIII, Trimurni.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VIII lainnya. M.Iqbal

misalnya, ia mempertanyakan upaya yang akan dilakukan para calon untuk menggandeng lembaga amil zakat nasional dalam mengelola zakat yang baik dan kredibel. Sementara Choirul Muna mengatakan bahwa saat ini telah ada dua puluh lembaga amil zakat yang mendapat sertifikat dari pemerintah seperti Lazis NU, Lazis Muhammadiyah, Tafakur dan lain sebagainya, bagaimana Baznas dapat berperan dan meyakinkan masyarakat bahwa Baznas lebih kredibel dibanding Lazis-Lazis tersebut.

Irsyadul Halim menjadi calon anggota Baznas yang pertama kali menjalani uji kepatutan dan kelayakan

mengatakan bahwa saat ini Baznas tidak dalam posisi berhadapan atau berkompetisi dengan LAZIS (lembaga amil zakat infaq dan sodaqoh) yang memang sudah diakui pemerintah. Karena memang harus diakui Lazis tersebut juga telah banyak berbuat. Namun ia justru akan menggandeng Lazis yang ada itu untuk menjadi mitra dan bersama-sama mengelola zakat umat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kemiskinan.

Sedangkan calon anggota Baznas lainnya, Bambang Sudibyo mengatakan bahwa dalam lima tahun ke

depan ia memiliki beberapa misi dalam menjalankan Baznas, yakni secara bertahap meningkatkan hasil penghimpunan zakat oleh Baznas dari sekitar 80 Miliar pada tahun 2014 menjadi 270 miliar pada tahun 2020 mendatang. Ia juga mengatakan akan secara agresif dan berkelanjutan mensosialisasikan Baznas, Baznas provinsi, Kabupaten/kota dan LAZ agar dikenal luas, menjadi populer dan dipercaya masyarakat muslim di Indonesia.

“Saya juga akan mencoba mengintegrasikan sistem pemungutan zakat oleh unit pengelola zakat dengan sistem pemungutan pajak oleh Kementrian

Keuangan dengan memanfaatkan system administrasi penggajian, dan pengupahan di berbagai instansi pemerintah, pemda, BUMN, dan perusahaan swasta yang ada,” ungkap Bambang.

Ditambahkan Mantan Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional di Era Presiden SBY itu, ia juga akan menyempurnakan *system governance*, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasi standar di Baznas sehingga menjadi badan amil zakat yang kredibel, akuntabel, efisien, efektif dan transparan dalam memungut dan mengelola zakat. (Ayu)/foto:andri/parle/hr

Tenaga Kerja dan Sertifikasi Badan Usaha Asing Jadi Perhatian Baleg



Komisi V DPR saat menyampaikan RUU tentang Jasa Konstruksi

Tenaga kerja asing dan sertifikasi badan usaha asing menjadi perhatian anggota Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dalam Rapat Pleno Baleg dipimpin Ketua Baleg Sareh Wiyono dengan agenda mendengarkan keterangan pengusul RUU tentang Jasa Konstruksi di Ruang Rapat Baleg Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Anggota Baleg dari F-PG Tabrani Maamun mempertanyakan keberadaan jasa konstruksi asing dalam RUU Jasa Konstruksi.

“Apakah jasa konstruksi asing tidak berpengaruh ter-

hadap jasa konstruksi Indonesia. Karena tenaga kerja kita di bidang konstruksi tergolong baik juga,” kata Tabrani.

Sementara anggota Baleg dari fraksi yang sama, Ahmad Zacky Siradj mempertanyakan sertifikasi badan usaha milik asing.

“Apakah sertifikasi yang dilakukan ini termasuk pada badan usaha dalam negeri maupun asing. Apakah badan usaha asing ini mendapatkan perlakuan yang sama dengan badan usaha dalam negeri,” tanya Zacky.

Sementara Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo mengingatkan dalam menghadapi persaingan ekonomi global, kita harus mengedepankan kepentingan nasional.

“Dalam penyusunan Undang-undang sebagai payung hukum, kita harus mengedepankan kepentingan nasional,” tegas Firman.

Menjawab pertanyaan anggota Baleg tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said sebagai pengusul RUU Jasa Konstruksi menjelaskan, bahwa tenaga kerja asing dalam bidang jasa konstruksi dibatasi hanya yang sifatnya keahlian atau teknik saja. Hal ini dimaksudkan unyuk transfer ilmu.

Sementara sertifikasi terhadap badan usaha, baik asing maupun dalam negeri mendapatkan perlakuan yang sama.

(sc) Foto: Naefuroji/parle/od

Baleg Tekankan Pentingnya Standar Keamanan dalam UU Jasa Konstruksi

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI (Baleg) Firman Subagyo mintakepada Pengusul RUU Jasa Konstruksi (Komisi V DPR RI) memberikan penekanan pentingnya standar keamanan dalam RUU Jasa Konstruksi.

“Saya rasa ini menjadi penting karena akhir-akhir ini kita

sering dihadapkan kepada sistem konstruksi dimana posisi dari standar keamanan masih sangat lemah,” kata Firman saat Rapat Pleno Baleg dipimpin Ketua Baleg Sareh Wiyono dengan agenda mendengarkan keterangan pengusul RUU Jasa Konstruksi di Ruang Rapat Baleg Gedung Nusantara I

DPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Ia mengingatkan, bahwa sudah adabeberapa UU terkait standar keamanan termasuk UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja. “Namun kami lihat terhadap sistem keamanan ini masih kurang karena lemahnya pengawasan. Oleh karena itu kami minta supaya nanti adanya penekanan didalam standar keamanan,” jelas politisi Partai Golkar ini.

Keamanan terhadap keselamatan kerja ini, tegas Firman, harus menjadi hal yang sangat penting dan harus mendapatkan penekanan.

Selanjutnya Firman juga mempertanyakan mengenai sanksi. “Terhadap mereka yang tidak melaksanakan harus mendapatkan sanksi yang sangat berat karena ini menyangkut masalah resiko yang sangat tinggi,” tukas Firman.

Selain itu, Firman mempertanyakan masalah pembentukan badan dalam RUU Jasa Konstruksi. sebagaimana disampaikan pengusul sebelumnya bahwa ada indikasi pembentukan sebuah badan. “Beberapa waktu lalu kami pernah membahas sebuah RUU dimana selalu ada pemunculan terbentuknya sebuah badan dan ini juga disikapi oleh pemerintah bahwa pemerintah melakukan semacam moratorium terhadap terbentuknya badan-badan atau lembaga-lembaga akibat daripada sebuah RUU yang diundangkan,” jelas anggota dewan dari Jawa Tengah ini.

Ia menyarankan, untuk urgensi pembentukan badan ini agar dikonsultasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Hal ini dimaksudkan agar nanti pada waktu rapat-rapat pembahasan tidak mengalami hambatan.

Menjawab hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M. Said sebagai pengusul RUU Jasa Konstruksi menjelaskan menyangkut standar keamanan sudah diatur dalam Bab XIII Pasal 106 bahkan sanksinya terkait dengan pidana.



Pimpinan Baleg DPR berjabat tangan dengan Wakil Ketua dan Anggota Komisi V DPR

“Ada sanksi pidana jika melanggar hal tersebut, dan keamanan untuk tenaga kerja kita sangat bagus karena kita berikan sanksi pidana sehingga didalam pelaksanaannya jauh lebih bagus daripada UU yang ada sekarang,” kata Muhidin.

Kemudian mengenai pembentukan badan, dijelaskan politisi Partai Golkar ini, bahwa badan ini bukan seperti BMKG atau badan penanggulangan bencana. Badan ini hanya dibawah menteri saja.

“Selama ini ada Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi (LPJK) menjadi Badan Pembinaan Jasa Konstruksi (BPJK) sehingga relevan dengan UU atau ketentuan yang ada dan tidak perlu membuat badan-badan baru seperti selama ini yang menjadi tantangan bagi kita semua,” jelasnya. (sc) Foto: Naefuroji/parle/od

PIA DPR-RI Santuni dan Buka Puasa Bersama Yatim Piatu



Ketua PIA Deisti Novanto dan Rita Oli Dondokambey foto bersama anak-anak Panti Asuhan

Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI agaknya tak pernah henti untuk berbagi dan menjalankan berbagai program sosialnya. Di pertengahan bulan Ramadhan ini PIA menggelar santunan yatim piatu yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama.

“Ini menjadi salah satu program yang telah disusun PIA, berbagi dengan sesama, lewat santunan untuk anak yatim piatu. Selain misi sosial, kehadiran kami ditengah anak-anak ini juga sekaligus untuk memperkenalkan generasi penerus bangsa akan lembaga legislatif, yakni DPR RI,” jelas Ketua umum PIA DPR RI Periode 2014-2019, Deisti A Novanto, Jumat (26/6) di Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI, Kalibata-Jakarta.

Tidak hanya itu, ditambahkan Deisti, dalam acara tersebut juga disisipkan nilai pendidikannya, lewat games atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan MC atau hostnya. Sebut saja pertanyaan yang menyangkut rukun Islam, kisah para nabi Allah SWT serta hafalan beberapa ayat suci Al Quran.

Deisti menilai *games* atau permainan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk anak-anak, melainkan juga untuk mengingatkan kembali dirinya serta anggota PIA lainnya akan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam ayat suci Al Quran.

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksanaan Santunan Yatim Piatu dan Buka

Puasa bersama, Rita Oli Dondokambey mengucapkan syukur dapat berbagi bersama anak-anak dari empat panti asuhan, yakni Panti asuhan Al Falah, Al Khairiyah, Al Husaini dan panti asuhan Hubbul Yattama. Karena baginya, di setiap harta yang dititipkan Tuhan terhadap hak anak yatim dan fakir miskin. Ke depan ia berharap dapat lebih ba-

nyak lagi menyantuni anak yatim piatu yang bernasib kurang beruntung.

“Saya bersyukur bisa berbagi dengan anak-anak dari empat panti asuhan yang totalnya mencapai dua ratus anak. Semoga ke depan kami bisa menyantuni panti asuhan lebih banyak lagi,” tambah Rita kepada Parlemen. (Ayu), Foto: Rizka/parle/od

Pekerjakan Anak, Reduksi Potensi dan Intelektual Anak

Rencana Menteri Tenaga Kerja menarik sekitar 16 ribu pekerja anak dari pekerjaannya disambut baik oleh DPR. Mereka akan dikembalikan ke dunia pendidikan. Mempekerjakan anak sama saja mereduksi semangat dan kapasitas intelektual sang anak.

“Tanpa disadari bahwa usia mereka bila dipaksakan melakukan pekerjaan di luar batas kemampuan usianya, akan mereduksi semangat dan potensi intelektualnya. Di daerah perkebunan kelapa sawit, anak rentan juga dipekerjakan, ikut orang tuanya untuk memenuhi target kerja orangtuanya sebagai buruh.” Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Ali Mahir, saat dihubungi Senin, (29/6).

Kementerian Tenaga Kerja sendiri sedang memulai kampanye menentang pekerja anak secara nasional. Mereka yang disasar adalah anak-anak yang bekerja dan putus sekolah dari kalangan keluarga miskin berusia 7-15 tahun. Tujuannya, agar anak terbebas dari pekerjaan terburuk dan berbahaya. Dengan mengembalikan anak ke sekolah diharapkan akan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.



Anggota Komisi IX DPR Ali Mahir

Mahir menjelaskan, Indonesia sendiri sudah memiliki UU sekaligus meratifikasi konvensi ILO tentang larangan bekerja bagi anak dan penghapusan praktik penghisapan terhadap anak. “Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenaker sudah merupakan kewajiban kita semua untuk mendukung dan mengapresiasinya,” kata Mahir.

Kampanye ini mesti disosialisasikan

secara luas ke setiap daerah. Anak-anak adalah penerus kelangsungan bangsa ini. Kemenaker, sambung politisi Partai Nasdem itu, harus didorong agar melakukan kampanye secara berkelanjutan. Bila ada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak harus diberi sanksi. Ini sudah masuk ranah pidana.

Problem masalah anak, kata Mahir, seperti tak ada habisnya. Anak-anak yang dipaksa bekerja untuk menopang ekonomi keluarga justru menghilangkan kesempatan emas anak untuk berkembang. Dan pekerja anak biasanya dari keluarga miskin. Apalagi keluarga petani, selalu mengharuskan anak-anaknya bekerja di sektor pertanian.

“Bila hanya anak-anak di perkotaan saja yang diperhatikan, sementara anak-anak di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan yang jauh dari pusat informasi kurang diperhatikan, maka ke depan akan menciptakan gap yang lebar dan mengancam ketahanan negara,” ungkapnya. (mh) Foto: Naefuroji/parle/od



Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso

Penarikan Pekerja Anak Harus Pikirkan Biaya Pendidikan

Menyusul kampanye penarikan pekerja anak di seluruh Indonesia oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), perlu dipikirkan biaya pendidikan para pekerja anak bila ingin dikembalikan ke dunia pendidikan. Ini penting

untuk meningkatkan kualitas hidup keluarganya.

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso (dapil Jateng III) menegaskan hal tersebut saat dihubungi Senin (29/6). Seperti diketahui, Menaker

mengampanyekan penarikan para pekerja anak di seluruh Indonesia. Pada tahap awal ini, ada sekitar 16 ribu pekerja anak yang ditarik dan dikembalikan kiprah hidupnya ke dunia pendidikan. Rata-rata para pekerja anak tersebut berasal dari keluarga miskin yang berusia 7-15 tahun.

“Saya setuju 16 ribu pekerja anak itu ditarik oleh pemerintah. Tapi saya minta pemerintah harus pula bertang-

gung jawab atas biaya sekolah. Harus ada bantuan pemerintah bagi keluarga miskin yang anaknya ditarik dari dunia kerja,” kata politisi PDI Perjuangan ini. Untuk itu, perlu ada pembicaraan dengan Komisi IX, baik menyangkut strategi kampanye dan dana kompensasi bantuan bagi keluarga miskin.

Program yang dicanangkan Kemaker tersebut juga untuk mendukung program keluarga harapan. Anak-anak

harus dibebaskan dari pekerjaan yang buruk dan berbahaya. Dengan menarik para pekerja anak, kualitas hidup keluarganya juga diharapkan meningkat. “Saya sarankan Menteri Tenaga Kerja harus bekerja sama dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Sosial. Komisi IX siap memfasilitasi dan membantu penganggarannya,” tandas Imam.

(mh) foto:iwan armanias/parle/iw.

Baleg Pantau Pelaksanaan UU Bantuan Hukum



Pimpinan Baleg DPR saat pertemuan dengan jajaran Pemprov. Jatim

Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah untuk memantau pelaksanaan UU no.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Bankum). Sejumlah masukan berhasil dihimpun dari pihak terkait diantaranya pejabat pemrov, Kakanwil Hukum dan HAM, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan akademisi dari perguruan tinggi.

“Program pemantauan sekaligus sosialisasi bukan hanya untuk UU belum kita sahkan tetapi juga UU yang sudah kita sahkan. Kami menghargai masukan yang telah disampaikan, kita akan bicarakan dalam rapat Baleg apakah dengan sejumlah input yang kita

terima muaranya adalah revisi UU,” kata Ketua Tim Kunker Baleg Firman Subagio di Kantor Gubernur Provinsi Jateng, Semarang, Kamis (25/6/15).

Ia berharap pada kesempatan sosialisasi selanjutnya Baleg dapat menggandeng pihak perguruan tinggi terutama LBH kampus untuk melakukan sosialisasi. Baginya pelibatan para cendekiawan yang berada di universitas sangat diperlukan dalam menuntaskan sebuah produk legislasi.

Firman yang juga Wakil Ketua Baleg ini juga menggarisbawahi salah satu UU yang saat ini perlu sosialisasi intens adalah UU Desa. Ia berharap pihak perguruan tinggi dapat mendukung upaya

ini agar kehadiran produk legislasi itu jangan sampai menjadi bumerang, bukan menyejahterakan tetapi menjerat aparat desa dengan kasus korupsi.

“Jangan sampai muaranya nanti Menkumham minta anggaran tambahan ke DPR untuk pembangunan penjara baru untuk menahan kepala desa atau aparat desa lain yang terjerat korupsi,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut sejumlah masukan berhasil dihimpun diantaranya dari Arifin akademisi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Menurutnya UU Bankum belum memberikan ruang kepada mahasiswa dan dosen fakultas hukum berpraktek litigasi, memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat di pengadilan karena terkendala belum punya surat izin beracara.

Sementara itu Sugiharto dari Asosiasi Advokat Indonesia menyebut kriteria miskin yang mendapat bantuan hukum cuma-cuma dari negara, perlu dipertegas. Tidak jarang pihak yang mengaku miskin dan minta bantuan hukum gratis ternyata dalam peninjauan lapangan memiliki harta yang seharusnya tidak dimiliki warga masuk kategori miskin.

Ia juga berharap honor yang disediakan negara bagi pengacara yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma agar diberikan pada awal proses perkara. “Honor dari negara sebaiknya dibayarkan di depan karena ini untuk biaya operasional, kalau setelah kasus selesai tidak ada artinya,” kata dia. (iky)

foto: ibnur/parle/hr

Banyak Penghulu Terlambat Terima Honor

Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim menyatakan, kecepatan

pembayaran biaya nikah oleh calon pengantin tidak diimbangi kecepatan

pengembalian dana tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah. Akibatnya banyak penghulu yang terlambat menerima honor padahal itu adalah hak para penghulu.

“Laporan yang saya terima banyak penghulu hingga awal Mei lalu belum



Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim

terima honor sebagai uang transport penghulu,” tegas Mustaqim saat dihubungi Parle, Jumat (26/6).

Hal itu dikatakannya sehubungan masih adanya penghulu yang menerima gratifikasi sebagaimana dilaporkan

Ketua KPK kepada Menteri Agama. Kata Plt KPK Taufiqurrahman Ruki, pihaknya masih menemukan adanya penghulu yang menerima gratifikasi saat melaksanakan tugas administrasi pernikahan. “Kami lihat di lapangan pelaksanaan PP 48/2014 masih kurang bagus dan tersendat. Pertemuan ini demi memberikan pelayanan lebih baik untuk saudara kita yang mau nikah atau rujuk,” ungkap Ruki.

Menurut Achmad Mustaqim, ada dua hal yang dibahas Komisi VIII dengan jajaran Kemenag yaitu sering terlambatnya pengembalian dana nikah tersebut ke KUA daerah sehingga pencairan ke penghulu terlambat. Selain itu, selama ini banyak yang keberatan melaksanakan akad nikah di KUA sebab dinilai kurang khusus dan tuma’nah, sehingga lebih senang melaksanakan akad nikah di rumah/

gedung dengan kehadiran banyak anggota keluarganya

“Hal-hal itulah yang menyebabkan masih terjadinya pungutan atau gratifikasi dengan perantara oknum perangkat desa. Karena itu saya berharap pelaksanaan PP 48/2014 perlu disempurnakan,” ujar politisi PPP ini.

Ia memaklumi aturan tersebut masih baru dan pengimplemetasiannya tentu perlu proses. Meski demikian, dia mengapresiasi niat baik pemerintah memperbaiki peraturan bagi para penghulu dan menghilangkan pungutan yang memberatkan masyarakat. “Selain lebih mengintensifkan sosialisasi aturan juga harus diiringi tekad yang kuat sehingga pungli atau gratifikasi yang membebani masyarakat bisa ditekan bahkan bisa dihapus,” jelas legislator asal Dapil Jateng VIII. (mp), foto : andri/parle/hr.

Aceh Alokasikan 198 Miliar Bagi Pendidikan Siswa Yatim Piatu



Tim kunjungan spesifik Komisi X DPR saat pertemuan dengan Sekda NAD

Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dalam Tahun Anggaran 2015 ini telah mengalokasikan dana sebesar Rp 198 Miliar. Dana tersebut dialokasikan sebagai bantuan biaya pendidikan bagi 110.101 anak yatim dan yatim piatu.

“Untuk Program Indonesia Pintar, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 198 miliar. Ini adalah bantuan langsung yang diberikan oleh Gubernur Aceh selaku Kepala Pemerintahan Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh,” kata Kepala Dinas Pendidikan Aceh Hasanuddin Darjo saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI terkait Program Indonesia Pintar, dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya dan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Dermawan di Gedung Serbaguna Gubernur Aceh, Minggu (21/6)

Darjo berharap, dengan anggaran yang diberikan tersebut dapat membantu para siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian maka angka siswa putus sekolah menjadi semakin

kecil, sehingga pendidikan Aceh akan semakin baik di masa yang akan datang.

Sementara itu, ia juga berharap agar Program Indonesia Pintar yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat, dapat menjadikan anak Aceh lebih pintar. “Untuk sampai kepada cita-cita Indonesia pintar, Aceh harus pintar, anak Aceh harus pintar, guru Aceh juga harus pintar dan masyarakat Aceh juga harus pintar,” ujarnya.

Ia juga berharap, program Indonesia Pintar akan memberi atensi khusus kepada anak-anak negeri ini yang kurang mampu agar diberikan dukungan pembiayaan oleh pemerintah pusat yang secara bertahap diberikan kepada anak-anak kita bukan semata mengurangi angka putus sekolah tetapi juga meningkatkan akses ke dunia pendidikan di seluruh Indonesia.

“Kita tentu saja berharap program ini memberikan jaminan kepada anak-anak kita, bahwa mereka mempunyai kemudahan untuk melanjutkan sekolah dengan fasilitas bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat,” jelas Darjo.

Sedangkan untuk bantuan dari Pemerintah Pusat kepada 205 ribu siswa Aceh, Darjo berharap pada tahun berikutnya akan ada penambahan jumlah dana dan jumlah siswa dari keluarga kurang mampu dan pra sejahtera yang mendapatkan bantuan pendidikan tersebut.

“Tahun ini kan masih tahap awal. Kita tentunya akan meminta kembali dan memberikan data pasti tentang jumlah riil siswa yang berhak mendapatkan bantuan ke Pemerintah Pusat. Kita tentu saja berharap tahun depan akan lebih banyak lagi siswa yang mendapatkan manfaat dari program Indonesia Pintar ini,” pungkasnya. (sc) Foto: Suciati/parle/od



Protokol Bersama Harus Bisa Dihasilkan

Protokol bersama yang menguatkan dan saling membantu di antara para anggota *Asian Parliamentary Assembly* (APA) harus bisa dihasilkan dalam pertemuan parlemen yang tergabung dalam APA 19-20 Agustus mendatang. Ini penting untuk meningkatkan kerja sama ekonomi atarnegara Asia.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Teguh Juwarno mengatakan, DPR RI akan menjadi tuan rumah perhelatan sidang *Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs*. Dengan pertemuan ini diharapkan ada protokol bersama yang dihasilkan untuk menumbuhkan ekonomi Asia ke level yang lebih baik. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga harus mengambil keun-

tungan dari pertemuan ini.

“Masih banyak PR pembangunan yang belum diselesaikan. Tentu banyak aspeknya. Dari sisi parlemen, kita mendorong legislasi di negara-negara anggota APA untuk meratifikasi legislasi yang sudah disepakati negara-negara Asia. Dengan ratifikasi itu, kita mendorong pencapaian *sustainable development goals* bisa lebih cepat,” harap Teguh, pada Kamis malam (25/6).

Yang juga penting, lanjut politisi PAN ini, Indonesia selalu dianggap sebagai negara dengan situasi perekonomian yang tidak mapan dan labil. Mudah dipertanyakan oleh para spekulasi. Dengan penyelenggaraan APA ini, Indonesia bisa mendesak di forum tersebut untuk membantu Indonesia dan negara-negara Asia lainnya bila sedang



Wakil Ketua BKSAP DPR Teguh Juwarno

menghadapi krisis ekonomi.

“Kerja sama ekonomi lebih ditujukan ke bilateral. Indonesia adalah salah satu pemain penting di Asia ini. Ketika ada persoalan dengan Indonesia pasti akan merambah ke negara-negara lain di sekitarnya. Di sinilah pentingnya protokol untuk mengantisipasi keadaan krisis. (mh), foto : riska arinindya/parle/hr.

Dana Aspirasi untuk Tutupi Kekurangan Anggaran Daerah



Anggota Baleg DPR Endang Srikarti Handayani

Anggaran reguler dari APBN dan APBD tak bisa menutupi sepenuhnya kebutuhan anggaran pembangunan di daerah. DPR RI lewat usulan program pembangunan dapil ingin menutupi kekurangan tersebut. Aspirasi rakyat di daerah semakin konkrit direalisasikan dengan program ini.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Endang Srikarti Handayani, menjelaskan, dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota justru untuk

mempercepat sekaligus pemerataan pembangunan daerah. “Memang ada program pembangunan dari pemerintah, tapi itu tidak cukup dan belum menyentuh aspirasi rakyat seluruhnya. Maka diadakanlah program pembangunan dapil. Ini bagus sekali,” papar Endang sebelum mengikuti rapat Paripurna, baru-baru ini.

Bila para anggota dewan sudah disumpah atas nama rakyat dan ingin konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat, di sinilah relevansi itu bertemu. Ada program aspirasi dapil yang bisa dimanfaatkan para anggota untuk merealisasikan pembangunan di daerah sesuai aspirasi yang diserapnya setiap kali reses.

“Jadi, saat kunjungan ke dapil itu, kan, menyerap banyak aspirasi. Nah, penyerapan itu kemudian dibawa ke fraksi masing-masing, termasuk ke rapat maring-maring, termasuk ke rapat paripurna. Kalau aspirasi itu tidak diakomodir, berarti selama ini tidak ada gunanya kunjungan ke dapil dan melakukan reses,” tandas Anggota Panja Baleg tersebut.

Politisi Golkar dari dapil Jateng V ini

mengungkapkan, anggaran Rp 20 miliar per anggota itu merupakan besaran maksimal yang bisa diajukan. Jadi, sambung Endang, tidak setiap anggota kebutuhan aspirasinya sampai Rp 20 miliar. Bisa saja anggaran yang dicairkan kurang dari Rp 20 miliar, bergantung dari kebutuhan anggaran program yang diajukan setiap anggota. Sebaliknya, bila Rp 20 miliar masih kurang, anggota yang bersangkutan bisa mengajukan tahun berikutnya.

“Setiap dapil bisa berbeda-beda. Ada yang menyerap Rp 10, 15, atau 20 miliar. Kalau kurang tidak bisa ditambah. Itu bisa diusulkan tahun depan lagi. Di dapil saya, ada 4 kabupaten. Dari keempatnya bisa saja kurang dari Rp 20 miliar. Dan yang mengeksekusi anggaran tersebut adalah Pemda. Jadi, anggota tidak pegang uang sama sekali. Hanya pegang proposal yang diusulkan rakyat. Setelah itu kita bawa ke fraksi. Dan fraksi mendelegasikan untuk dibacakan di paripurna,” tutur Endang lagi. (mh) foto : iwan armanias/parle/hr.

Komisi VII Pantau Kesiapan Pertamina Hadapi Lonjakan Kebutuhan Lebaran



Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR Satya W. Yudha menggelar pertemuan dengan Regional I Terminal BBM PT. Pertamina, Tanjung Uban, Kepri

Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Regional I Terminal BBM PT. Pertamina, Tanjung Uban, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini untuk memantau kesiapan perusahaan milik negara ini dalam menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat pada bulan Ramadan dan Lebaran 2015, terutama di wilayah Sumatera Bagian Utara.

“Kami datang memantau kesiapan

Pertamina Sumatera bagian utara ini untuk pemenuhan kebutuhan bulan Ramadan dan Lebaran, kita inspeksi lapangan ke terminal yang menerima barang impor baik BBM maupun LPG di Tanjung Uban, berapa besaran kapasitas *storage* BBM maupun LPG,” kata Ketua Tim Kunjungan Setya W. Yudha, Selasa (30/7).

Ia mengharapkan seluruh ketersediaan dan pendistribusian bahan

bakar yang menjadi tanggung jawab Pertamina dapat terpenuhi dengan lancar, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan BBM serta penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak terjadi.

Romulu Hutapea, General Manager Marketing Operation Region (MOR) I menjelaskan wilayah kerjanya meliputi lima provinsi yaitu Aceh, Sumut, Riau, Kepulauan Riau dan Sumbar. Ia menyebut telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak menghadapi hari besar tahunan ini.

“Kami telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, pemda dan instansi terkait untuk menghadapi Ramadhan dan Lebaran ini, ditambah lagi kerjasama dengan Kepolisian, TNI, dan aparat lainnya untuk membantu kelancaran operasional mobil tangki selama Lebaran,” terangnya.

Untuk menjaga pasokan LPG pihaknya memutuskan untuk mengoperasikan stasiun pengisian 7 hari seminggu, dengan memaksimalkan seluruh skid tank yang ada. Kemudian sebagai penyeimbang harga jual, Pertamina juga memastikan ketersediaan LPG 3 Kg dan 12 Kg di outlet SPBU dan gerai Indomaret. (ray/iky) foto: rizka/parle/hr

Baleg Apresiasi Animo Kampus Dukung UU Bankum

Ketua Badan Legislasi - Baleg DPR RI Sarehwiyo menyampaikan apresiasi kepada kalangan kampus yang ingin terlibat langsung dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tersangkut kasus hukum. Ia berharap kendala yang dihadapi saat ini tidak mengurangi semangat untuk mewujudkan keadilan bagi semua.

“Saya sangat mengapresiasi, hanya para hakim saat ini terikat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no.4/2009 yang menekankan siapapun yang memberikan pendampingan akan ditanya apakah sudah mempunyai surat izin beracara,” katanya dalam pertemuan di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Kamis (25/6/15).

Sebagai mantan Ketua Pengadilan Tinggi, politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengaku sangat paham bagaimana suasana persidangan. Keinginan perguruan tinggi terutama



Pimpinan Baleg DPR berdialog dengan Ketua Pengadilan Tinggi Jateng



mahasiswa dan dosen dari fakultas hukum untuk terlibat memberikan bantuan hukum sesuai UU no.16/2011 menurutnya patut dihargai.

Agenda pertemuan kali ini terselenggara dalam kunjungan kerja Baleg menyosialisasikan UU Bantuan Hukum (Bankum). Sementara itu anggota Baleg dari FPDIP Dwi Ria Latifa menambahkan UU Advokat juga tegas mengatur pengacara yang dapat terlibat langsung di persidangan harus sudah memiliki SK Advokat.

“Saya rasa pihak universitas pasti punya kemampuan untuk memberi bantuan hukum, tetapi kita tidak bisa menabrak UU Advokat. Alangkah lebih baik dibuat sistem alumni universitas yang sudah menjadi pengacara aktif ditarik kembali, dibuat program bagus jadi mahasiswa termasuk dosen bisa terlibat bersama mereka,” saran dia.

Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto menyambut baik masukan yang disampaikan sejumlah pihak dalam pertemuan tersebut. Disamping melakukan sosialisasi, kegiatan ini menurutnya juga dalam kerangka pengawasan, apakah se-

jumlah kebijakan yang ditetapkan di lapangan sudah sesuai dengan UU.

Ia juga menyoroti keluhan sejumlah Lembaga Bantuan Hukum yang baru menerima honor dari negara dalam kegiatan bantuan hukum cuma-cuma bagi warga miskin, setelah kasus memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). “Kalau memperhatikan UU pasal 18 dan PP pasal 22 seharusnya honor bisa diberikan pada setiap tingkatan peradilan,” tekannya.

Sebelumnya, Sahlan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang mempertanyakan kebijakan hakim yang selalu menanyakan kartu izin beracara pada saat sidang. Menurutnya ini menghalangi kesempatan bagi mahasiswa dan dosen memberikan bantuan hukum terutama kepada warga miskin.

“Peradilan adalah laboratorium bagi kami yang ada di kampus, seharusnya mahasiswa dan dosen bisa diperhatikan, toh kasus ini bukan komersial tetapi cuma-cuma,” tutur dia. (*iky*) foto: *ibnur/parle/hr*

Komisi I Setujui Calon Panglima TNI Pilihan Presiden



Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR foto bersama Panglima TNI terpilih

Rapat Pleno Komisi I DPR RI akhirnya secara bulat menyetujui calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Ketukan palu pimpinan sidang sebagai tanda persetujuan baru dapat diambil setelah Rapat Dengar Pendapat Umum yang sebagian berlangsung tertutup berakhir pada pukul 21.15 WIB.

“Bahwa Komisi I dengan ini menyetujui pemberhentian Jenderal TNI

Moeldoko sebagai Panglima TNI dan menyetujui Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI untuk selanjutnya dibawa kepada rapat paripurna DPR. Setuju?” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq yang memimpin jalannya sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/15).

Pertanyaan ini segera disetujui oleh seluruh peserta sidang. Dalam penjelasannya Mahfudz juga menyebut

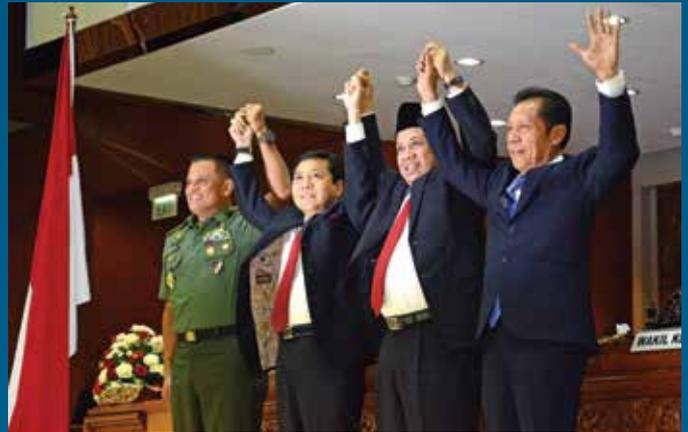
beberapa fraksi menyampaikan sejumlah catatan dalam persetujuannya. Fraksi Nasdem meminta komitmen calon Panglima TNI untuk memprioritaskan industri pertahanan dalam negeri.

Sementara Fraksi Partai Golkar menurutnya menyampaikan tiga catatan penting, Panglima TNI perlu mengambil langkah terobosan dalam memenuhi kesejahteraan prajurit, mencari solusi kasus sengketa tanah milik TNI dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas pokok TNI.

Politisi FPKS ini juga memaparkan proses pengambilan keputusan berlangsung hangat namun semua sepaham keputusan akhir diambil dengan musyawarah mufakat. “Rapat internal terjadi pembahasan yang hangat tetapi putusan akhir tetap mengedepankan prinsip musyawarah mufakat karena itu kultur asli bangsa Indonesia yang harus dijaga,” demikian Mahfudz. (*iky*) foto: *andri/parle/hr*



Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyerahkan laporan Proses Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Panglima TNI dan KaBIN (kiri), Panglima TNI terpilih Jend. Gatot Nurmantyo dan Kepala BIN Letjend. (purn) Sutiyoso berpose bersama Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil Ketua Fahri Hamzah (kanan), Jumat (03/07) Foto: Jaka/Parle/HR



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dan anggota Komisi IV Onno Surono bersama Menteri Pertanian Andi Amran beserta Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra saat panen bawang di Desa Jati Seeng Kecamatan Ciledug, Selasa (30/06) Foto: Agung/Parle/HR



Inspeksi Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Laboratorium Pertamina Tanjung Uban, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (30/06) Foto: Rizka/Parle/HR



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI kunjungi pasien tidak mampu di RSUD Balikpapan, Senin (29/06) Foto: Sugeng/Parle/HR